



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2/ 3767 /2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan perkada ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program tersebut diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI REMBANG,



HARNO

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Perbup	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Rembang	Rencana Peruntukan Kawasan dan Pengaturan Zonasi	√		2026	Deskripsi untuk mengatur: 1. Rencana Struktur Ruang 2. Rencana Pola Ruang 3. Ketentuan Pemanfaatan Ruang 4. Peraturan Zonasi 5. Kelembagaan 6. Ketentuan Lain-lain 7. Ketentuan Peralihan	DPUTARU	Juli 2026	
2.	Perbup	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Tahun 2022-2035 Kabupaten Rembang	Penyusunan suatu konsep strategis pengelolaan sarana dan prasarana air minum di Daerah	√		2026	RISPAM sebagai acuan Pemerintah Daerah atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan air minum di Dearah	DPUTARU	Februari 2026	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	Perbup	Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik	Menambah anggota DPRD dan Pemerintah Desa terkait subjek penandatanganan naskah dinas elektronik		√	2026	Perubahan ini bertujuan untuk menambah subjek penandatanganan Naskah Dinas Elektronik agar mencakup Pemerintah Desa dan DPRD, dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan meningkatkan kepastian hukum penggunaan Tanda Tangan Elektronik bersertifikasi	- DINKOMINFO - Seluruh OPD	Juni 2026	
4.	Perbup	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang	Perubahan untuk menambahkan materi Geospasial		√	2026	- Penambahan materi Geospasial - Menambahkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 7/Juklak/Sesmen/12/2022 tentang Penyusunan Daftar Data - Menambahkan pasal daftar data	- DINKOMINFO - Seluruh OPD	Mei 2026	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							yang telah sesuai, ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Forum Satu Data Indonesia			
5.	Perbup	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029	Menyusun rencana tenaga kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029	√		2026	Tindaklanjut atas PP Nomor 15 Tahun 2007 dan Permenakertrans Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	DINPERINNAKER	2026	
6.	Perbup	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Penetapan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Peraturan Bupati	√		2026	-	BPBD	Maret 2026	
7.	Perbup	Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2026-2035	Analisis potensi investasi Daerah, visi misi, arah kebijakan (iklim investasi, prioritas sektor seperti pangan, infrastruktur, energi terbarukan, UMKM), insentif, promosi, infrastruktur	√		2026	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang Tahun 2016-2025 yang telah habis masa berlakunya	- DPMPTSP - BAPPEDA - DPUTARU - DINDAGKOP-UKM - DINPERINNAKER - DINLUTKAN - DINTANPAN - DPKP	Maret 2026	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			pendukung serta tata kelola dan perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP) untuk menciptakan iklim kondusif, menggerakkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan melalui investasi yang berwawasan lingkungan				sehingga diperlukan Peraturan Bupati terbaru yang mengatur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2026-2035	- BPPKAD - DLH - DINKES - DINBUDPAR - DINDIKPORA		
8.	Perbup	Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penanaman Modal Berbasis Risiko	Pedoman dan tata cara pengawasan dan penanaman modal berbasis risiko	√		2026	Dalam rangka meningkatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Rembang, diperlukan pengaturan dengan Peraturan Bupati	- DPMPTSP - BAPPEDA - DPUTARU - DINDAGKOP-UKM - DINPERIN-NAKER - DINLUTKAN - DINTANPAN - DPKP - BPPKAD - DLH - DINKES - DINBUDPAR - DINDIKPORA	Maret 2026	
9.	Perbup	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP	1. Penambahan klausul 3 (tiga) persyaratan dasar perizinan berusaha (sesuai PP 28/2025) 2. Perubahan pada lampiran terkait:		√	2026	Berdasarkan pemberlakuan PP 28/2025 tentang PBBR yang menggantikan PP 5/2021 sehingga diperlukan perubahan Peraturan Bupati	DPMPTSP	Maret 2026	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			a. Penyesuaian kode KBLI b. Penghapusan perizinan/nonperizinan yang sudah tidak dilayani				Nomor 7 Tahun 2023 untuk menambahkan klausul terkait 3 (tiga) persyaratan dasar, penyesuaian kode KBLI dan penghapusan layanan perizinan/non perizinan			
10.	Perbup	Izin Penyelenggaraan Reklame	Proses perizinan penyelenggaraan reklame meliputi: jenis, persyaratan, proses dan prosedur, titik lokasi, pengawasan dan penindakan	√		2026	Dalam rangka diperlukannya dasar hukum yang kuat, integrasi perizinan dengan OSS-RBA, peningkatan PAD, lingkungan yang tertib serta estetis, maka diperlukan Peraturan Bupati	- DPMPTSP - DPUTARU - DLH - DINHUB - BPPKAD	Mei 2026	
11.	Perbup	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun	√		2026	Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun	40 OPD	Juni 2026	
12.	Perbup	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027	Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan	√		2026	Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	40 OPD	Juli 2026	Maksimal 1 (satu) bulan setelah

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat				untuk periode 1 (satu) tahun			penetapan Perbup RKPD Tahun 2027
13.	Perbup	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P RKPD) memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun		√	2026	Dokumen perubahan perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun	40 OPD	Juli 2026	
14.	Perbup	Pedoman Pengelolaan Risiko	Pedoman Pengelolaan Risiko Pemda dan Perangkat Daerah dengan penilaian risiko menggunakan Matriks Hitmap	√		2026	Dokumen aturan Pedoman Pengelolaan Risiko	40 OPD	Januari-Juli 2026	Menjadi dasar integrasi manajemen risiko ke dokumen perencanaan
15.	Perbup	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	Penetapan Keputusan Menteri Nomor 900.1.3.2-1287 tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai	√		2026	Sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	BAGIAN ORGANISASI SETDA	Januari 2026	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah							2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
16.	Perbup	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPERIDA	Mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BAPPERIDA berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang	√		2026	Sebagai dasar pembentukan BAPPERIDA Kabupaten Rembang	BAGIAN ORGANISASI SETDA	Januari 2026	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPEDA
17.	Perbup	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	Mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan	√		2026	Sebagai dasar pembentukan BKPSDM	BAGIAN ORGANISASI SETDA	Januari 2026	Mencabut Peraturan Bupati

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Fungsi serta Tata Kerja BKPSDM	fungsi serta tata kerja BKPSDM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang				Kabupaten Rembang			Rembang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKD
18.	Perbup	Sistem Kerja	Penyesuaian sistem kerja sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	√		2026	Sistem kerja baru dengan pembentukan tim-tim kerja.	BAGIAN ORGANISASI SETDA	Februari 2026	
19.	Perbup	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat	Pengaturan kembali penyesuaian uraian tugas Inspektorat Daerah		√	2026	Sebagai pedoman penyesuaian uraian tugas Inspektorat Daerah	BAGIAN ORGANISASI SETDA	Februari 2026	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Daerah Kabupaten Rembang								Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang
20.	Perbup	Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Mengatur pembentukan PUSKESMAS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024	√		2026	Sebagai dasar pembentukan PUSKESMAS di Kabupaten Rembang	- BAGIAN ORGANISASI SETDA - DINAS KESEHATAN	Maret 2026	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
21.	Perbup	Pembubaran/ Penghapusan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar	Penyesuaian bentuk Satuan Pendidikan sesuai dengan Pasal 3 huruf h Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang	√		2026	Sebagai pedoman membubarkan Sanggar Kegiatan Belajar	- BAGIAN ORGANISASI SETDA - DINDIKPORA	April 2026	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rembang
22.	Perbup	UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	Penyesuaian uraian tugas UPT Pengelolaan Sampah	√		2026	Penyesuaian uraian tugas UPT Pengelolaan Sampah	- BAGIAN ORGANISASI SETDA - DLH	Mei 2026	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
23.	Perbup	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang	Pengaturan kembali Tata Naskah Dinas berdasarkan Peraturan MENDAGRI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	√		2026	Sebagai pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	BAGIAN ORGANISASI SETDA	Juni 2026	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
24.	Perbup	Hari Kerja dan Jam Kerja Pemerintah Daerah dan Pegawai ASN Daerah	Penyesuaian Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Daerah dan Pegawai ASN Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN	√		2026	Sebagai pedoman Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN Daerah	BAGIAN ORGANISASI SETDA	Juli 2026	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
25.	Perbup	Pembentukan UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang	Mengubah status UPT BLK pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	√		2026	Mengubah status UPT BLK pada DINPERINNAKER	BAGIAN ORGANISASI SETDA - DINPERINNAKER	Agustus 2026	
26.	Perbup	Staf Ahli Bupati	Penyesuaian tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Staf Ahli Bupati Rembang		√	2026	Sebagai pedoman penyesuaian uraian tugas Staf Ahli Bupati Rembang	BAGIAN ORGANISASI SETDA - STAF AHLI	September 2026	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Fungsi serta Tata Staf Ahli Bupati Rembang
27.	Perbup	Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	Pengaturan kembali Pakaian Dinas berdasarkan Peraturan MENDAGRI Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	√		2026	Sebagai pedoman penggunaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	BAGIAN ORGANISASI SETDA	November 2026	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Pegawai ASN Daerah
28.	Perbup	UPT Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	√		2026	Sebagai pedoman pembentukan UPT Instalasi Farmasi	BAGIAN ORGANISASI SETDA DINAS KESEHATAN	Maret 2026	
29.	Perbup	Kelas Jabatan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	Penyesuaian Kelas Jabatan Pegawai ASN sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.	√		2026	Sebagai dasar Penetapan Kelas Jabatan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	BAGIAN ORGANISASI	Januari 2026	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Rembang dan perubahannya
30.	Perbup	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029	Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sesuai RPJMD Tahun 2025-2029	√		2026	Sebagai dasar penghitungan pencapaian target IKU Tahun 2025-2029	BAGIAN ORGANISASI	Januari 2026	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan perubahannya
31.	Perbup	Pengelolaan Pasar Rakyat	- Izin Penggunaan Fasilitas/ Mekanisme Pemanfaatan/ Syarat Penggunaan Ruang Dagang yang terdiri atas: a. Pendaftaran; b. Masa Berlaku; c. Pencabutan izin; d. Perubahan/Balik Nama; e. Perpanjangan. - Klasifikasi Kelas Pasar; - Tata tertib yang berisi kewajiban dan larangan; - Sanksi; - Pihak yang terkait;	√		2025	- Izin Penggunaan Fasilitas/ Mekanisme Pemanfaatan/ Syarat Penggunaan Ruang Dagang yang terdiri atas: a. Pendaftaran; b. Masa Berlaku; c. Pencabutan izin; d. Perubahan/Balik Nama; e. Perpanjangan. - Klasifikasi Kelas Pasar; - Tata tertib yang berisi kewajiban dan larangan; - Sanksi;	DINDAGKOP UKM	Juli 2026	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			- Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar				- Pihak yang terkait; - Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar			
32.	Perbup	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	- Lingkungan penataan pedagang kaki lima - Pendataan pedagang kaki lima - Pemutakhiran data - Pendaftaran pedagang kaki lima - Permohonan tanda daftar usaha (TDU) atau kartu identitas pedagang kaki lima - Penetapan lokasi pedagang kaki lima - Relokasi pedagang kaki lima - Kelembagaan susunan keanggotaan, fungsi dan tugas Tim Koordinasi Penataan - Tata cara kelembagaan	√		2026	- Lingkungan penataan pedagang kaki lima - Pendataan pedagang kaki lima - Pemutakhiran data - Pendaftaran pedagang kaki lima - Permohonan tanda daftar usaha (TDU) atau kartu identitas pedagang kaki lima - Penetapan lokasi pedagang kaki lima - Relokasi pedagang kaki lima - Kelembagaan susunan keanggotaan, fungsi dan tugas Tim	DINDAGKOP UKM	Januari 2026	Luncuran dari Propemperbup 2025

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			- Perlindungan masyarakat - Pengawasan dan evaluasi - Pembinaan - Tata cara pembayaran denda				- Koordinasi Penataan - Tata cara kelembagaan - Perlindungan masyarakat - Pengawasan dan evaluasi - Pembinaan - Tata cara pembayaran denda			
33.	Perbup	Beasiswa Prestasi Perguruan Tinggi	- Ruang lingkup pemberian beasiswa - Kriteria calon penerima beasiswa - Seleksi calon penerima beasiswa - Pelaksanaan - Komponen pemberian beasiswa - Mekanisme pencairan - Kewajiban penerima beasiswa - Penghentian beasiswa - Pengawasan	√		2026	Pelaksanaan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dan Renstra Dindikpora Tahun 2025-2029 yaitu perluasan akses Pendidikan melalui pemberian beasiswa untuk menuju satu desa satu sarjana	DINDIKPORA	Mei 2026	
34.	Perbup	Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Ikan	- Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil	√		2026	Untuk mengatur: 1. Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi	DINLUTKAN	Juni 2026	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Produksi Usaha Daerah				2. Keberatan atas penetapan retribusi serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi 3. Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi 4. Kelebihan pembayaran retribusi 5. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi Pelaporan, pembukuan dan pemeriksaan			
35.	Perbup	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan	- Penyempurnaan teknis tata cara pemungutan retribusi penyediaan TPI, penegasan kedudukan dan penugasan Pembantu Bendahara Penerimaan, perbaikan redaksional dan penyesuaian dengan ketentuan		√	2026	Penyesuaian administratif dan teknis terhadap Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024, termasuk penegasan Koordinator TPI sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah	DINLUTKAN	Juni 2026	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			peraturan perundang-undangan				dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025, tanpa mengubah objek dan tarif retribusi			
36.	Perbup	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan <i>Cash Management System</i> Pelelangan Ikan di TPI Kabupaten Rembang	Penyesuaian penyelenggaraan sistem pembayaran pelelangan ikan secara nontunai melalui <i>Cash Management System</i> , mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi pelelangan ikan ke Kas Umum Daerah, penguatan pengawasan, pelaporan, serta sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		√	2026	Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta untuk menjamin fleksibilitas kerjasama perbankan dalam rangka pengamanan Pendapatan Asli Daerah	DINLUTKAN	Maret 2026	
37.	Perbup	Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan	Mengatur petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2025, meliputi pendataan pelaku usaha perikanan, mekanisme pelindungan dan pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan,	√		2026	Untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan	DINLUTKAN	September 2026	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			fasilitasi asuransi nelayan dan pembudidaya, perjanjian kerja dan bagi hasil, partisipasi Masyarakat, tata cara pemberian bantuan, serta pengenaan sanksi administratif							
38.	Perbup	Penyelenggaraan Parkir Umum	Pengaturan lokasi parkir, penetapan tarif, perizinan, standar pelayanan, kewajiban pengelola, pengawasan dan penertiban parkir	√		2026	Diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan peraturan yang	DINHUB	Maret 2026	
39.	Perbup	Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir		√		2026		DINHUB	April 2026	
40.	Perbup	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi: pendapatan, belanja dan pembiayaan	√		2026	Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun setelah selesainya proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah audited selesai	BPPKAD	Mei 2026	
41.	Perbup	Penjabaran APBD 2027	Penjabaran APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah	√		2026	Perbup Penjabaran APBD disusun setelah Perda APBD ditetapkan, yaitu maksimal bulan	BPPKAD	Desember 2026	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Desember tahun n-1			
42.	Perbup	Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemkab Rembang Tahun 2027	Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan	√		2026	Sebagai dasar penilaian MCP KPK	BPPKAD	Juni 2026	
43.	Perbup	Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2027	Pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemkab Rembang untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah tahun 2027	√		2026	Sebagai dasar penilaian MCP KPK	BPPKAD	Mei 2026	
44.	Perbup	Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Ketentuan teknis dan prosedur administrasi terkait dengan penilaian PBB-P2	√		2026	Perbup ini disusun sebagai pedoman ketentuan teknis dan prosedur administrasi terkait dengan penilaian PBB-P2	BPPKAD	Juni 2026	
45.	Perbup	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ketentuan umum, kriteria, mekanisme, penelitian dan prosedur administrasi terkait dengan penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah	√		2026	Perbup ini disusun sebagai pedoman Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPPKAD	Juni 2026	
46.	Perbup	Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan,	Ketentuan teknis dan prosedur administrasi terkait dengan	√		2026	Perbup ini disusun sebagai pedoman Pemberian	BPPKAD	September 2026	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
47.	Perbup	Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Ketentuan teknis dan prosedur administrasi terkait dengan Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	√		2026	Perbup ini sebagai pedoman Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	BPPKAD	Februari 2026	
48.	Perbup	Tata Cara Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	1. Bantuan teknis 2. Bimbingan teknis 3. Diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau 4. Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah	√		2026		DLH	Desember 2025	
49.	Perbup	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas Kabupaten Rembang sebagai	Pola Keuangan BLUD Puskesmas		√	2026	Pelaksanaan pola keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Rembang	DINAS KESEHATAN	Maret 2026	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Badan Layanan Umum Daerah								
50.	Perbup	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Bahan Habis Pakai atas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Perubahan pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Bahan Habis Pakai atas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan		√	2026	Perubahan harga BHP	DINAS KESEHATAN	Agustus 2026	
51.	Perbup	Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Penyusunan Peraturan Bupati ini akan dilakukan dalam rangka Perubahan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional	√		2026	Peraturan Perbup ini mengatur tentang Penyelenggaraan yang terdiri dari Dukungan Pemerintah Daerah, Sumber Pembiayaan dan Mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Rembang	DINAS KESEHATAN	Januari 2026	Luncuran dari Propemperbup 2025
52.	Perbup	Muatan Lokal Bahasa Jawa	a. Ketentuan Umum b. Asas dan Tujuan c. Unsur Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa d. Fungsi Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa e. Arah, Strategi Kebijakan dan Pelaksanaan	√		2026	Satuan Pendidikan wajib menggunakan Bahasa Jawa di Muatan Lokal	DINDIKPORA	Januari 2026	Luncuran dari Propemperbup 2025

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			f. Monitoring dan Evaluasi Ketentuan Penutup							
53.	Perbup	Batas Desa	Titik koordinat batas wilayah dan Peta Desa	√		2026	Untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa	DINPERMADES	Oktober 2026	34 Perbup Batas Desa/ Kelurahan
54.	Perbup	Standar Pelayanan Minimal Desa	Mengatur tentang Ketentuan Umum, Prosedur Pelayanan, Standar Pelayanan Minimal Desa, Jenis Pelayanan, Pejabat Penyelenggara SPM Desa, Pembentukan Tim Teknis, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-lain dan Penutup	√		2026	a. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat Desa guna perwujudan kesejahteraan umum sesuai dengan kewenangan Desa b. Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) adalah ketentuan	DINPERMADES	Juli 2026	Perbup

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap Masyarakat desa secara minimal			
55.	Perbup	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	√		2026	Memberikan penjelasan terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	DINPERMADES	Oktober 2026	
56.	Perbup	Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)	Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)	√		2026	Memberikan penjelasan tentang tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)	DINPERMADES	Oktober 2026	
57.	Perbup	Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah	√		2026	Memberikan kejelasan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah	DINPERMADES	Oktober 2026	
58.	Perbup	Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2027	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa	√		2026	Menjelaskan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa	DINPERMADES	Oktober 2026	
59.	Perbup	Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian	Perubahan syarat penyaluran dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa		√	2026		DINPERMADES	Maret 2026	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa								
60.	Perbup	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029	1. Maksud dan tujuan 2. Ruang lingkup 3. Sistematika penyusunan 4. Pemantauan dan evaluasi			2026	Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 merupakan amanat Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, pada Pasal 13 bahwa salah satu tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) adalah penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode 5 tahun.	- BAPPEDA - DINSOSPPKB - DINPERMADES - DINDUKCAPIL - DINAS KESEHATAN	Maret 2026	1. Dokumen RPKD 2025-2029 telah selesai disusun 2. TKPKD Kabupaten Rembang berdasarkan SK Bupati Nomor 400.9.10/1318/2024 tentang pembentukan TKPKD Kabupaten Rembang Tahun 2024

BUPATI REMBANG,


HARNO